

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Jumlah Pembiayaan pada BSI KCP Kampung Pajak

Indah Wahyuni¹, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution²

¹Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Korespondensi Penulis : indahwahyuni1420@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini menganalisis tentang apa saja yang menjadi faktor faktor lain yang mempengaruhi jumlah kenaikan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia terumata di BSI Kampung Pajak. Apa saja faktor eksternal dan faktor internal nya dan mengapa hal itu bisa terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif Deskriptif yang pengumpulan datanya melalui hasil wawancara dan observasi, serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil menunjukkan Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah pembiayaan di BSI Kampung Pajak adalah Tingkat Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (*NPF*), *Return On Asset* (ROA) dan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). ROA dan BOPO yang merupakan gambaran tingkat rentabilitas bank tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena dana yang disalurkan untuk pembiayaan sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan bukan berasal dari *profit* yang diperoleh bank.

Kata Kunci : Bank, Kenaikan, Jumlah, Pembiayaan.

PENDAHULUAN

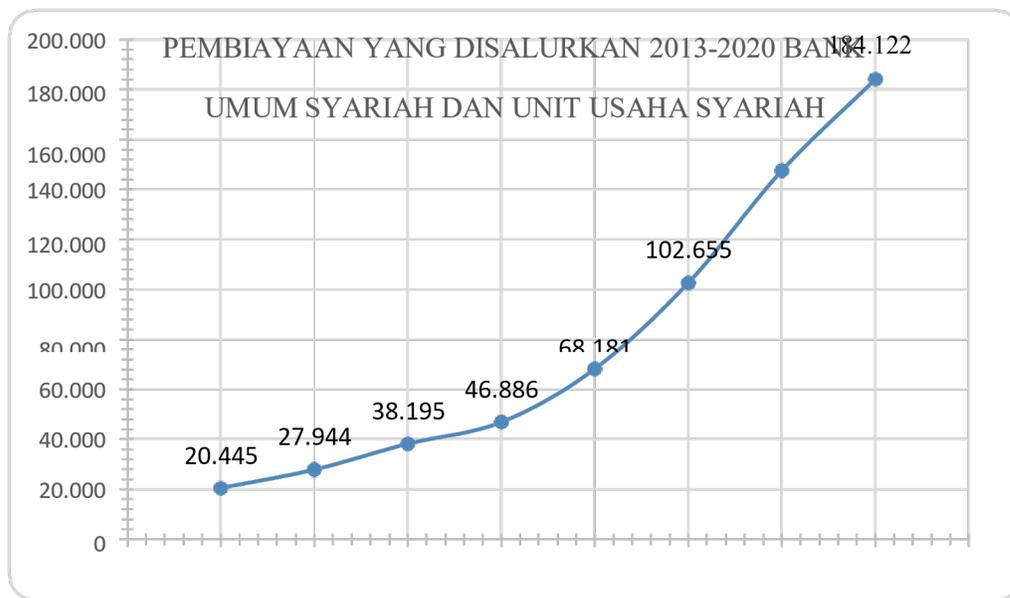
Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga.

Konsep Islam adalah menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan syari'ah memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil.

Industri perbankan syariah terus tumbuh, dimana laju peningkatan ekspansi volume usaha tahun 2018 mencapai 36,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2017 (28,0%) dan pembiayaan juga menunjukkan laju pertumbuhan yang meningkat dari 34,2% pada tahun 2017 menjadi 36,7% (2018).

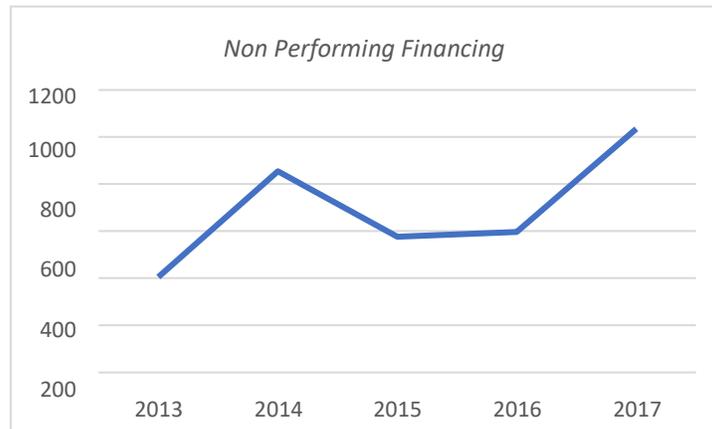
Di samping itu profitabilitas perbankan syariah mengalami peningkatan, tercermin dari return on asset (ROA) yang meningkat dari 1,8% (2017) menjadi 2,1% (2018). Undang-undang perbankan syariah (UUPS) disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 16 Juli 2018. Pemberlakuan UUPS No.21 tahun 2008 adalah bagian dari upaya regulator untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah dari sisi penguatan kerangka hukum bank syariah. Sehingga para pelaku dan investor lebih confidence dalam mengembangkan perbankan syariah (Apriyanti, 2020).

Pembiayaan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah yang disalurkan tiap tahunnya mengalami peningkatan tahun 2017 tercatat pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 20.445.000.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar 36,68% pada tahun 2018. Tahun 2018 pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar 36,68%. Meskipun terjadi krisis keuangan global pada tahun 2017-2020 pembiayaan yang disalurkan tetap mengalami peningkatan. Gambar 1.2 menunjukkan grafik pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2013-2020, data diperoleh melalui statistic perbankan syariah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Nurbiaty, 2017).



Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Pembiayaan

Di dalam konsep perbankan syariah, jika jumlah pembiayaan meningkat maka kemungkinan risiko untuk pembiayaan bermasalah semakin besar pula. Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank dalam menyalurkan dananya dan untuk mendapatkan keuntungan bagi bank. Adiwarmanto A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004)h.9. Oleh karena itu BUS dan UUS harus lebih berhati-hati untuk mengalokasikan dana pembiayaannya. Saat ini, Bank Syariah sudah memberikan pembiayaan dengan jumlah yang sangat tinggi untuk sektor konstruksi. Ditinjau dari keputusan Bank Syariah atas pemberian pembiayaan tersebut, maka ada kemungkinan yang besar dalam pembiayaan bermasalah atau gagal bayar. Dari tahun ke tahun *Non Performing Financing* pada Bank Syariah cenderung mengalami peningkatan.



Gambar 1.2. Grafik Perkembangan NPF pada Bank Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK yang telah diolah

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat perkembangan pembiayaan non-lancar (NPF) yang terjadi pada sektor ekonomi perubahan NPF cenderung fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan NPF dari tahun 2013 yang cukup tinggi dari 405 miliar rupiah menjadi 854 miliar rupiah. Pada tahun 2015 NPF mengalami penurunan lalu kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2017 (Kurniawati, 2014).

Adapun faktor internal lainnya dan faktor eksternal yang mempengaruhi jumlah kenaikan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. Pada umumnya faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan jumlah kenaikan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia adalah Dana Pihak Ketiga, dimana di setiap tahunnya DPK terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi acuan bank dalam menyalurkan dananya kepada pembiayaan.

Disini penulis ingin mencari tau dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor faktor lain yang mempengaruhi jumlah kenaikan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia terumata di BSI Kampung Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al Quran dan hadist nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. (Hasibuan, 2010) Antonio dan perwataatmadja membedakan antara Bank Islam dan bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam.

Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, secara khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan Antonio dan Perwataatmadja.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank

akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain : (1) memindahkan uang; (2) menerima dan membayarkan kembali uang nasabah; (3) membeli dan menjual surat-surat berharga; dan (4) memberi jaminan bank.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan system bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah islam. Dengan kata lain, bank islam lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat islam di Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah lahir di Indonesia, sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang no.7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan system bagi hasil atau bank syariah (Antonio, 2004).

Lahirnya bank syariah yang pertama di Indonesia merupakan hasil kerja sama tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya (Muhammad, 2016).

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
2. Prinsip Keseimbangan (*tawazum*) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sector riil, bisnis dan social, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian;
3. Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keeluruhan dan tidak menimbalak kemudharatan.
4. Prinsip Universalisme (*alamiyah*) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Islam memberi kebebasan kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Ini sebagaimana pendapat mahzab Hambali Maliki. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas, sehingga tidak ada yang diharamkan, kecuali yang diindikasikan keharamannya dalam ajaran islam (A Z, 2012).

Selain sebagai penghimpun dana bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara (intermediasi keuangan) atau sebagai pembiayaan seperti yang diatur dalam pasal 1 UU No.7 tahun 1992. Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa bank syariah merupakan badan usaha (Sulhan dan Elly Siswanto, 2008a).

Sebagai badan usaha bank syariah juga bertujuan untuk mencari laba karena bank syariah pun merupakan badan usaha. Sedangkan sebagai sebuah bank, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. *Agent of trust* yaitu bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk dapat menitipkan dananya dan menyalurkan pada sector-sektor yang tepat.
- b. *Agent of service* yaitu bank sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan bank syariah ini dapat tercapai jika bank syariah menyalurkan kreditnya pada sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan perekonomian secara riil (Sulhan dan Elly Siswanto, 2008).

Bank syariah mempunyai tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktekpraktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan).
- b. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang leboh besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

2. Pembiayaan

Menurut Ahmad Sumianto Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.

Menurut Adiwarmar Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.

Pembiayaan merupakan pendanaan penyediaan uang yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Djamil, 2012).

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

Artian luasnya, pembiayaan dalam praktek perbankan adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan *defisit unit*(Muhammad, 2004).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni :

- a. Pemilik
Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat

Pemilik dana. Sebagaimana pemilik, mereka mengharapppkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

Debitur yang bersangkutan. Para debitur dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

Masyarakat umumnya-konsumen. Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan eluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya (Supriyadi, 2002).

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan daya guna barang.
- c. Meningkatkan peredaran uang.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha.
- e. Stabilitas ekonomi.
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dimulai sejak tanggal 14 Februari 2022- 14 Maret 2022. Penelitian dilakukan di BSI KCP Kampung Pajak tepatnya di Jl. Lintas Sumatera, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhan Batu Utara. Data berdasarkan sumbernya terdiri dari dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari pihak pertama, seperti data yang diperoleh kuesuiner atau wawancara langsung dengan narasumber yaitu kepala cabang dan BSI KCP Kampung Pajak. Dalam penelitian juga menggunakan data sekunder yaitu informasi terkait penelitian yang bersumber dari website BSI KCP Kampung Pajak. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala cabang atau kepala bagian operasional dan Pegawai PT. BSI KCP Kampung Pajak Objek dalam penelitian ini adalah Varians Biaya Operasional. Teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga

Pembiayaan pada sektor riil memiliki porsi yang paling besar dibandingkan aktiva perbankan syariah lainnya seperti penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga, dan lainnya. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah tahun 2021, dana yang disalurkan

kepada pembiayaan yang diberikan adalah sebesar 78.91%, penempatan di bank lain sebesar 2.50%, penempatan di BI 13.69%, surat berharga 4.15%, penyertaan 0.02%, dan tagihan lainnya sebesar 0.73%.

Perkembangan pembiayaan perbankan syariah dan dana pihak ketiga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1. Hal ini pun dapat dilihat dari perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga mengalami peningkatan, bahkan mencapai 100.32% yang berarti permintaan likuiditas semakin tinggi. Hal ini juga menunjukkan jumlah pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) mencapai 32.2% pada tahun 2021 melebihi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 29.4%.

Pertumbuhan DPK yang melambat berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) tahun 2020 dipengaruhi oleh tren penurunan suku bunga perbankan. Perbankan syariah memanfaatkan tren tersebut untuk meningkatkan porsi tabungan dan giro, sekaligus mengurangi ketergantungan struktur dana pada pemilik dana yang memiliki target *return* tinggi. Perbankan syariah memanfaatkan tingkat suku bunga dalam menentukan tingkat imbalan DPK. Hal ini dilakukan agar perbankan syariah dapat bersaing dengan perbankan konvensional dalam hal tingkat *return* yang akan diberikan. Selain dipengaruhi penyesuaian struktur DPK yang dilakukan dalam merespon penurunan tingkat bunga, pelambatan pertumbuhan DPK perbankan syariah juga dipengaruhi oleh penarikan dana haji oleh Kementerian Agama yang mencapai 4.2 triliun rupiah. Pengaruh kedua faktor tersebut terlihat pada kepemilikan DPK oleh nasabah institusi. Pertumbuhan DPK institusi pada tahun 2020 sebesar 26.4% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan keseluruhan DPK BUS dan UUS. Sumber dana perbankan syariah masih sangat didominasi oleh instrumen pendanaan jangka pendek sehingga mempengaruhi fleksibilitas bank dalam mengoptimalkan pengelolaan dana.

2. Perkembangan Rasio Keuangan Perbankan Syariah

Kinerja perbankan syariah dapat dilihat dari rasio keuangan perbankan syariah. Menunjukkan perkembangan FDR, BOPO, NPF, dan ROA. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berada pada tingkat rata-rata 97% selama periode yang diteliti. Rata-rata FDR mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, namun penurunan tersebut tidak begitu signifikan. FDR mencapai tingkat 100% pada akhir 2020. Hal ini berarti permintaan likuiditas perbankan syariah semakin meningkat.

Non Performing Financing (NPF) atau yang dikenal dengan pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tercatat NPF mencapai tingkat 4% pada tahun 2018 dan semakin menurun hingga mencapai tingkat 2.62% per Desember 2021. Semakin menurunnya NPF ini menunjukkan semakin baiknya bank dalam mengelola resiko pembiayaan bermasalah.

Return On Asset (ROA) yang menunjukkan tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh investasi yang dilakukan bergerak cenderung stabil pada tingkat 1-2%. Sementara rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional cenderung stabil pada tingkat 70- 80% yang tidak melebihi rasio BOPO maksimum 85% yang telah ditetapkan Bank Indonesia pada tahun 2021, semakin rendah BOPO maka semakin baik dan memperlihatkan semakin tinggi tingkat efisiensi perbankan.

3. Perkembangan Tingkat Bagi Hasil/Ekuivalen Imbalan Pembiayaan

Tingkat bagi hasil/ekuivalen imbalan pembiayaan merupakan imbalan yang diperoleh atas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad tertentu. Penelitian ini meneliti tentang tingkat bagi hasil atau imbalan yang diperoleh bank. Perkembangan tingkat bagi hasil yang ditunjukkan memperlihatkan perkembangan yang cenderung stabil. Namun, pada tahun 2018 terdapat

peningkatan yang begitu tajam pada tingkat bagi hasil, peningkatan bagi hasil pada tahun tersebut bahkan mencapai tingkat 50%. Hal ini terutama didominasi oleh tingkat imbalan pembiayaan murabahah yang mencapai kisaran 70-80% pada bulan April-Juni. Namun, tingkat bagi hasil ini kembali stabil pada bulan- bulan berikutnya.

Uji Stasioneritas

Pengujian stasioneritas menggunakan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF). Pengujian dilakukan pada tahap *level* sampai dengan *first difference* dengan menggunakan asumsi *Schwarz Information Criterion* pada *automatic lag length selection* dengan *maximum lag* sebesar 9.

Variabel	Level		1st	MacKinnon
LnPembiayaan	0.232135	-3.508508	-6.159019	-3.510740
TBH	-3.831273	-2.928142	-5.569845	-2.931404
LnDPK	-1.177843	-3.508508	-4.638795	-3.529758
NPF	-2.663545	-3.508508	-8.623151	-3.510740
FDR	-2.254415	-2.925169	-7.942639	-2.926622
ROA	-2.479187		-10.37338	-2.926622

Tabel 3.1 Uji Stasioneritas

t-Kritis

Data dikatakan stasioner adalah ketika hasil t-hitung lebih kecil daripada t-kritis MacKinnon pada taraf nyata 5%. Hasil yang dicetak tebal pada Tabel 1 menunjukkan data yang stasioner baik pada *level* maupun *first difference*. Hasil menunjukkan variabel yang stasioner di *level* hanya tingkat bagi hasil (TBH) dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan pada *first difference* semua variabel stasioner. Oleh karena itu, akan dilakukan pengujian kointegrasi, jika terdapat kointegrasi maka akan digunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM), namun jika tidak terdapat kointegrasi maka akan digunakan VAR *first difference*.

Uji Stabilitas VAR

Firdaus menyatakan bahwa uji stabilitas VAR dilakukan dengan menghitung akar- akar dari fungsi polinomial atau dikenal dengan *roots of characteristic polinomial*. Jika nilai dari semua akar fungsi polinomial tersebut memiliki nilai absolut <1 atau berada di dalam *unit circle* maka model VAR tersebut dianggap stabil sehingga *Impulse Response Function* (IRF) dan *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) yang dihasilkan dianggap valid. Tabel stabilitas VAR yang terdapat di dalam lampiran menunjukkan nilai modulus yang berkisar antara 0.283022-0.971900. Hal ini menunjukkan bahwa model VAR yang digunakan dianggap stabil, sehingga IRF dan FEVD dianggap valid.

Uji Selang Optimal

Firdaus menyatakan bahwa uji selang optimal digunakan untuk mengetahui seberapa lama pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Selain itu, pengujian selang optimal digunakan untuk menghindari adanya autokorelasi di dalam model. **Tabel 3.2 Uji Lag Optimal**

Lag	Schwarz Information Criterion
1	-38.11670
2	-43.72833*
3	-42.30641
4	-41.31378

Tabel 2 menunjukkan hasil uji selang optimal. Kriteria selang optimal yang digunakan adalah *Schwarz Information Criterion*. Hasil menunjukkan bahwa selang optimum terdapat pada selang 1, yaitu ditunjukkan oleh angka yang paling kecil.

Uji Kointegrasi

Firdaus mengemukakan bahwa uji kointegrasi bertujuan untuk menentukan variabel-variabel yang tidak stasioner terkointegrasi atau tidak. Penelitian ini menggunakan *Johansen Cointegration Test* dengan membandingkan antara *trace statistic* dan *critical value*. Apabila *trace statistic* lebih besar daripada *critical value*, persamaan tersebut terkointegrasi. Kointegrasi dapat diartikan sebagai hubungan jangka panjang antarvariabel.

Tabel 3.3 Uji Kointegrasi

	H ₀	R=0	R≤1	R≤2	R≤3	R≤4	R≤5
	H ₁	R≥1					
		173.85	107.04	75.45	49.72	29.66	12.35
Critical Value		134.68	103.85	76.97	54.08	35.19	20.26
Trace Statistic			R≥2	R≥3	R≥4	R≥5	R≥6

Hasil uji kointegrasi ditunjukkan oleh Tabel 3. H₀ menunjukkan tidak ada kointegrasi dan H₁ merupakan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya kointegrasi. Kriteria penolakan H₀ adalah jika *trace statistic* lebih besar daripada *critical value*. Hasil menunjukkan terdapat dua rank kointegrasi pada taraf nyata 5% yang digunakan. Menurut Firdaus, hal ini berarti secara *multivariate* terdapat persamaan linier jangka panjang yang dikandung di dalam model.

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kenaikan Jumlah Pembiayaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah pembiayaan dilihat dari hasil estimasi VECM. Estimasi VECM menunjukkan pengaruh dari faktor-faktor yang diteliti dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penentuan signifikansi variabel berdasarkan taraf nyata sebesar 5%.

Tabel 3.4 Hasil Estimasi VECM

Jangka Pendek	
Variabel	Koefisien
CointEq1	1.279281
D(LNPEMBIAYAAN(-1))	0.187087
D(TBH(-1))	-0.011092
D(LNDPK(-1))	0.479669
D(NPF(-1))	2.649695
D(FDR(-1))	0.303318
D(ROA(-1))	-1.453989
D(BOPO(-1))	0.063405
Jangka Panjang	

TBH(-1)	-0.016594
LNDPK(-1)	-1.002176
NPF(-1)	0.607357
FDR(-1)	-1.056423
ROA(-1)	1.420142
BOPO(-1)	-0.085682
C	1.096800

Hasil estimasi VECM pada Tabel 4 menunjukkan pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek. Angka yang dicetak tebal menunjukkan variabel-variabel yang signifikan. Kointegrasi kesalahan bernilai positif dan signifikan. Variabel-variabel yang tidak signifikan dalam jangka pendek mengindikasikan bahwa suatu variabel bereaksi terhadap variabel lainnya membutuhkan waktu yang pada umumnya terjadi dalam jangka panjang.

a. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif. Hasil estimasi VECM menunjukkan ketika terjadi kenaikan sebesar 1% pada tingkat bagi hasil, maka akan menaikkan pembiayaan sebesar 0.016594%. Tingkat bagi hasil merupakan imbalan yang akan diperoleh bank dari pembiayaan yang diberikan, sehingga semakin tinggi tingkat bagi hasil, maka semakin tinggi pembiayaan yang diberikan karena keuntungan yang diperoleh bank pun akan semakin tinggi. **b. Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hasil estimasi menunjukkan ketika dana pihak ketiga meningkat sebesar 1%, maka akan menaikkan pembiayaan sebesar 1.002176%. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bagi pembiayaan, maka semakin tinggi dana pihak ketiga akan meningkatkan pembiayaan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan DPK dan pembiayaan, tren DPK yang semakin meningkat diikuti dengan tren pembiayaan yang semakin meningkat pula.

c. Non Performing Financing (NPF)

NPF memiliki hubungan signifikan yang negatif terhadap pembiayaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, artinya NPF bisa menjelaskan pergerakan pembiayaan perbankan syariah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil estimasi menunjukkan ketika NPF naik sebesar 1%, maka pembiayaan akan menurun sebesar 0.607357%. NPF merupakan pembiayaan bermasalah, sehingga ketika NPF meningkat, dana yang ada tidak bisa diputar kepada pembiayaan. Hal ini menyebabkan bank harus menyediakan biaya penghapusan yang lebih besar sehingga akan menurunkan minat bank untuk menyalurkan pembiayaan.

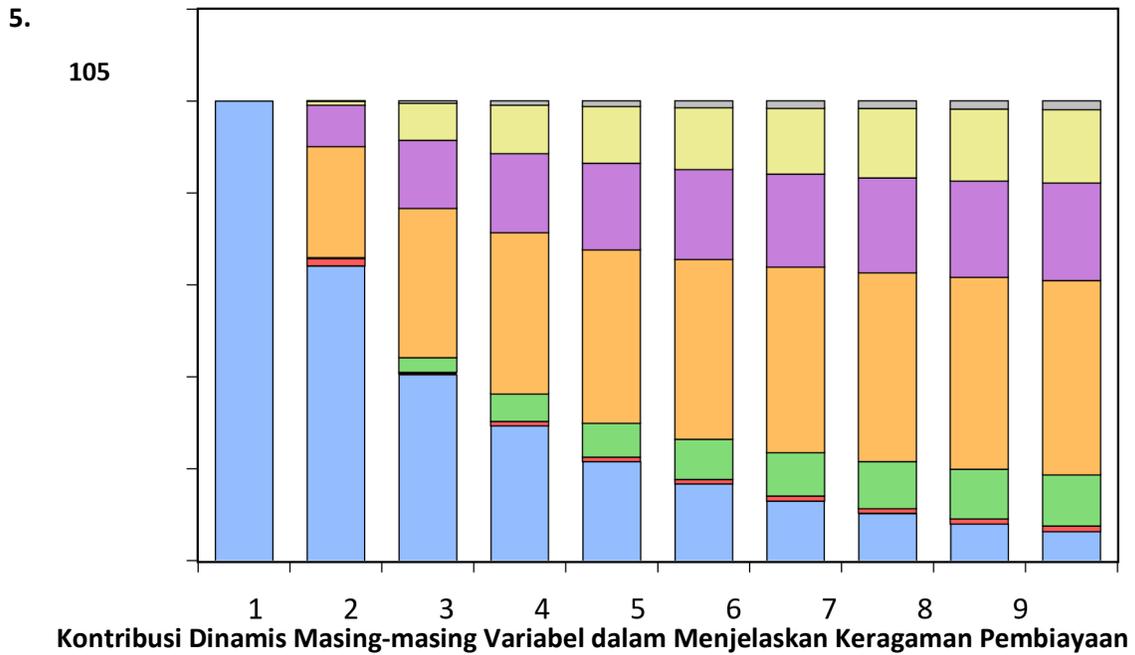
d. Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan, dimana ketika FDR meningkat sebesar 1%, akan meningkatkan pembiayaan sebesar 1.056423%. FDR merupakan rasio keuangan yang mengukur likuiditas bank. FDR adalah rasio yang membandingkan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Hasil menunjukkan hubungan FDR dengan pembiayaan yang sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi FDR menunjukkan semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan dari dana pihak ketiga yang diterima.

e. ROA dan BOPO

Return On Asset (ROA) dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. ROA dan BOPO menggambarkan tingkat rentabilitas bank. Hasil menunjukkan ROA dan BOPO yang tidak signifikan, hal ini berarti keuntungan yang diperoleh bank tidak disalurkan kepada pembiayaan karena sumber dana yang disalurkan kepada pembiayaan berasal dari dana pihak ketiga.

Variance Decomposition of PEMBIAYAAN

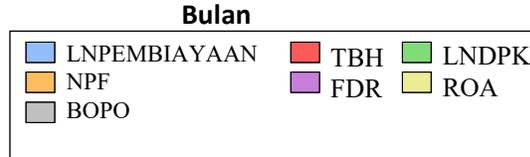


85

100

95

90



Gambar 3.2 Variance Decomposition

Analisis *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) adalah model VAR yang bertujuan untuk memprediksi kontribusi presentase varian setiap variabel karena adanya perubahan variabel tertentu dalam sistem VAR. Analisis FEVD digunakan untuk menggambarkan relatif pentingnya setiap variabel dalam sistem VAR karena adanya *shock* (Juanda dan Junaidi, 2012)

Hasil pada Gambar 3.2 menunjukkan bahwa pada bulan pertama pembiayaan masih 100% dipengaruhi oleh pembiayaan itu sendiri. Bulan-bulan berikutnya menunjukkan keragaman pembiayaan mulai dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya. Bulan kedua menunjukkan pembiayaan masih dominan dipengaruhi oleh pembiayaan itu sendiri sebesar 91.02%, tingkat bagi hasil sebesar 0.39%, dana pihak ketiga sebesar

0.05%, NPF sebesar 6.06%, FDR sebesar 2.27%, ROA sebesar 0.20%, dan BOPO sebesar 0.01%. Bulan-bulan berikutnya menunjukkan penurunan pengaruh pembiayaan terhadap keragaman pembiayaan itu sendiri dan terdapat peningkatan pengaruh dari variabel lainnya. Terlihat pada bulan kesepuluh pengaruh pembiayaan menjadi 76.60%, tingkat bagi hasil sebesar 0.28%, dana pihak ketiga sebesar 2.78%, NPF sebesar 10.58%, FDR sebesar 5.31%, ROA sebesar 4.00%, dan BOPO sebesar 0.46%.

Hasil FEVD ini menunjukkan kontribusi dinamis dari variabel-variabel yang diteliti terhadap keragaman pembiayaan. Keragaman dari pembiayaan paling besar dipengaruhi oleh pembiayaan itu sendiri, kemudian NPF, dan FDR. Semakin lama kontribusi dari pembiayaan itu sendiri terhadap keberagaman pembiayaan semakin menurun. Penurunan kontribusi pembiayaan ini digantikan oleh peningkatan kontribusi dari variabel lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel yang signifikan hanya NPF. Hubungan jangka panjang dari tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif. *Return On Asset* (ROA) dan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. ROA dan BOPO yang merupakan gambaran tingkat rentabilitas bank tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena dana yang disalurkan untuk pembiayaan sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan bukan berasal dari *profit* yang diperoleh bank.
2. Hasil menunjukkan Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah pembiayaan di BSI Kampung Pajak adalah Tingkat Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), *Return On Asset* (ROA) dan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Saran dari adanya hasil penelitian ini adalah :
 1. Perbankan syariah harus melakukan upaya untuk meningkatkan DPK karena permintaan likuiditas yang sudah semakin tinggi. Peningkatan DPK terutama untuk instrumen pendanaan berjangka panjang dapat dilakukan dengan usaha agar institusi bisa menyimpan dananya di perbankan syariah, seperti dana haji dari Kementerian Agama dan institusi lainnya yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan peraturan mengenai hal tersebut.

2. Penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan perbankan syariah dari sisi internal perbankan yaitu dari rasio keuangan perbankan syariah serta tingkat bagi hasil dan dana pihak ketiga. Pada penelitian berikutnya disarankan menggunakan variabel-variabel makroekonomi misalnya tingkat suku bunga agar dapat melihat pengaruh keadaan ekonomi terhadap pembiayaan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A Z, W. (2012). *Pembiayaan Bank Syari'ah*. PT. Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2004). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Apriyanti, R. dkk. (2020). FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN SEKTOR KONSTRUKSI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 5(1), 12.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, M. (2010). *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Grafindo Persada.
- Kurniawati, A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. UII PRESS.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Nurbiaty, N. dkk. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 11.
- Sulhan dan Elly Siswanto. (2008a). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. UIN Malang Press.
- Sulhan dan Elly Siswanto. (2008b). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. UIN Malang Press.
- Supriyadi, A. (2002). *Bank Syariah: Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*. STAIN Kudus.